

DS:0938-0147-8895-6581

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.539139/2026

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 03
Tanggal : 11 April 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
- 2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
- 3. Provinsi : (25) PAPUA
- 4. Kode/Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
- Sebesar : Rp. 130.064.000 (SERATUS TIGA PULUH JUTA ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang

Rp. 130.064.000
Rp. 130.064.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 130.064.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNB | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNB TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAYAPURA (063) Rp. 130.064.000

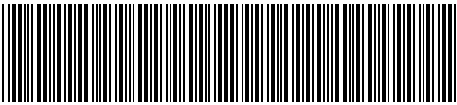
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2026
I A. INFORMASI KINERJA



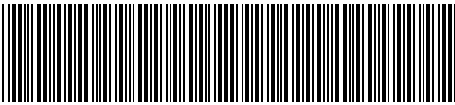
DS:0938-0147-8895-6581

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			130.064.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			130.064.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Kegiatan Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		2. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		3. 01	Jumlah Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		4. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		5. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		6. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		7. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		8. 02	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		9. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		10. 03	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN			
		11. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		12. 04	Jumlah Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		13. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		14. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		15. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		16. 08	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
Klasifikasi Rincian Output	1 :	1059.AEA	Koordinasi	1,00 kegiatan		12.000.000
Rincian Output	:	01	AEA.002	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.00 kegiatan	12.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2026
I A. INFORMASI KINERJA



DS:0938-0147-8895-6581

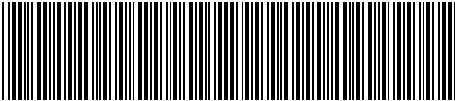
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Klasifikasi Rincian Output	2	:	1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	198.000
Rincian Output		:	01	BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.00	Perkara	198.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang	33.216.000
Rincian Output		:	01	QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)	96.00	Orang	33.216.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	2,00	Perkara, Berkas Perkara	84.650.000
Rincian Output		:	01	QCA.002 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (PN)	2.00	Perkara	84.650.000

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2026
I B. SUMBER DANA



DS:0938-0147-8895-6581

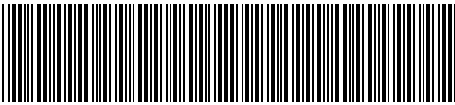
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	130.064.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	130.064.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN

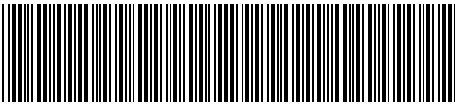


DS:0938-0147-8895-6581

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Kewenangan : (KD)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA	-	130.064	-	-	-	130.064	25 . 51	
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	130.064	-	-	-	130.064		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	130.064	-	-	-	130.064		
1059.AEA	Koordinasi (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	12.000	-	-	-	12.000		
01	RM	-	12.000	-	-	-	12.000		
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	198	-	-	-	198		
01	RM	-	198	-	-	-	198		
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	33.216	-	-	-	33.216		
01	RM	-	33.216	-	-	-	33.216		
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (25.51 PAPUA / KOTA JAYAPURA)	-	84.650	-	-	-	84.650	25 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:0938-0147-8895-6581

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode>Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
Kewenangan : (KD)

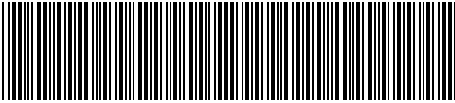
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		-	84.650	-	-	-	84.650	063	
JUMLAH		-	130.064	-	-	-	130.064		

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:0938-0147-8895-6581

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (25) PAPUA
Kode/Nama Satker : (539139) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

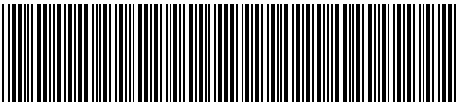
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	539139	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	4.400	3.150	4.400	45.975	4.400	45.975	4.598	3.650	4.400	3.566	5.550	130.064
		BELANJA BARANG	0	4.400	3.150	4.400	45.975	4.400	45.975	4.598	3.650	4.400	3.566	5.550	130.064
		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	0	4.400	3.150	4.400	45.975	4.400	45.975	4.598	3.650	4.400	3.566	5.550	130.064
	005.05.BF.1059	52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	4.400	3.150	4.400	45.975	4.400	45.975	4.598	3.650	4.400	3.566	5.550	130.064

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2026
IV A. B L O K I R



DS:0938-0147-8895-6581

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [539139] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

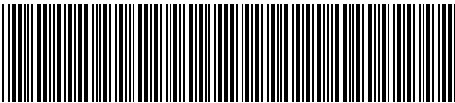
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.05.2.539139/2026
IV B. C A T A T A N



DS:0938-0147-8895-6581

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [25] PAPUA
Kode dan Nama Satker : [539139] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775